



LAPORAN KEGIATAN DPR RI

Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru Ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan United In Diversity (UID) Bali Campus

3-5 Desember 2025
Bali - Indonesia



THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2025



LAPORAN KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA (PANJA) EKONOMI BIRU
KE KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KURA KURA BALI
DAN UNITED IN DIVERSITY (UID) BALI CAMPUS

*Penguatan Ekonomi Biru Indonesia Melalui Diplomasi Pengetahuan,
Pembangunan Berkelanjutan, dan Kemitraan Global*

Bali, Indonesia, 3-5 Desember 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 99.093 km dengan sekitar 70% wilayahnya berupa laut dalam yurisdiksi nasional. Dengan karakter tersebut, ruang maritim Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kawasan ekologis, tetapi juga menjadi ruang ekonomi, diplomasi, dan basis penting bagi agenda pembangunan masa depan. Dalam dua dekade terakhir, wacana global mengenai ekonomi biru (*blue economy*) telah mengalami pergeseran signifikan dari sekadar eksploitasi sumber daya laut menuju paradigma ocean stewardship, investasi berbasis alam (*nature-based investment*), dan pembangunan regeneratif yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, serta keadilan sosial.

Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk berperan strategis dalam agenda tersebut melalui berbagai kerangka kerja global. Komitmen ini antara lain tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 14: Ekosistem Lautan (Life Below Water), G20 Bali Leaders' Declaration yang menekankan pentingnya ekonomi kelautan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif dalam UN Ocean Conference dan berbagai forum internasional terkait lainnya. Melalui kerangka-kerangka tersebut, Indonesia berupaya menunjukkan bahwa kepentingan nasional di sektor kelautan selaras dengan tanggung jawab global untuk menjaga lautan.

Pada tingkat nasional, mandat ini diperkuat melalui beragam regulasi dan agenda pembangunan, termasuk visi Ekonomi Biru Indonesia 2045, penyusunan kerangka ekonomi biru yang lebih komprehensif, serta penguatan tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, memegang peran penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan ekonomi biru sejalan dengan komitmen internasional dan menjawab kebutuhan domestik. Dengan demikian, DPR RI menjadi salah satu aktor kunci dalam menjembatani arah kebijakan global dan realitas lokal di tingkat daerah.

Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI dibentuk sebagai instrumen untuk mengonsolidasikan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), mendorong penguatan diplomasi maritim Indonesia, serta memperkuat ekosistem investasi biru yang berkelanjutan dan berkeadilan. Panja ini diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan ekonomi biru dirumuskan secara inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan global yang terus berkembang. Salah satu luaran yang ditargetkan adalah penyusunan Indonesia White Paper on Blue Economy yang dapat menjadi rujukan strategis bagi praktik diplomasi dan tata kelola ekonomi biru di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemahaman langsung atas ekosistem inovasi, tata kelola kawasan, serta model investasi yang berkembang di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang menjadikan ekonomi biru sebagai inti strategi pembangunan. Dalam konteks ini, Bali

dipandang sebagai salah satu laboratorium alam dan sosial yang paling relevan untuk mempelajari dan menguji berbagai pendekatan ekonomi biru secara lebih mendalam.

Kunjungan Panja BE kali ini akan mengunjungi dua institusi, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura dan United in Diversity (UID) Bali Campus. Kunjungan ke KEK Kura Kura Bali penting karena kawasan ini dirancang secara eksplisit sebagai laboratorium hidup bagi penerapan prinsip *regenerative tourism*, infrastruktur hijau dan biru, serta *impact investment*. Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, Kura Kura Bali memperlihatkan secara konkret bagaimana kebijakan, arsitektur pembiayaan, dan upaya konservasi dapat disinergikan dalam satu model pembangunan terintegrasi. Pengadopsian perspektif Tri Hita Karana (THK) sebagai landasan pembangunan menjadikan kawasan ini relevan tidak hanya bagi Bali, tetapi juga bagi berbagai platform global yang menggunakan THK sebagai rujukan dalam mendorong pencapaian SDGs, termasuk melalui THK Forum yang memfasilitasi *blended finance*, investasi berkelanjutan, dan pengembangan kawasan yang berpihak pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Sementara itu, kunjungan ke UID Bali Campus memberikan dimensi pelengkap dari sisi pengetahuan, inovasi, dan jejaring global. UID Bali berada di garis depan pendidikan keberlanjutan di Asia dan menjalin kolaborasi erat dengan institusi kelas dunia seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, Tsinghua University, serta jaringan global penggerak pembangunan berkelanjutan. Kampus ini berfungsi sebagai pusat pelatihan kepemimpinan, pusat inovasi SDGs, dan inkubator proyek *blue innovation* yang mencakup pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pemetaan kelautan, pengembangan model pembiayaan biru, dan perancangan *regenerative design* yang relevan bagi tata kelola kelautan Indonesia. Dengan menghubungkan pemangku kepentingan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat adat, akademisi, serta jejaring internasional, UID Bali menawarkan perspektif *multi-helix collaboration* yang selaras dengan mandat

Panja Ekonomi Biru untuk menjembatani diplomasi, kebijakan, dan riset ilmiah.

Melalui rangkaian kunjungan ke KEK Kura Kura dan UID Bali, Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI dapat mengidentifikasi kesenjangan kebijakan ekonomi biru yang dapat diperkuat melalui peran DPR RI dan BKSAP, mengkaji kesiapan ekosistem investasi biru untuk memasuki pasar global, serta memperluas jejaring *policy knowledge* dengan institusi bereputasi internasional. Kunjungan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai hub kawasan bagi diplomasi ekonomi biru dan SDGs, selain menegaskan kembali kepemimpinan diplomasi parlemen Indonesia dalam tata kelola laut yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Panja Blue Economy BKSAP DPR RI ke KEK Kura Kura dan UID Bali Campus adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 69 ayat (2) yang mengatur peran diplomasi parlemen dalam mendukung politik luar negeri Indonesia dan Pasal 116 ayat (1) yang memberi mandat pada BKSAP DPR RI untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan serta kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.
2. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, khususnya Pasal 4 ayat (2), Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 yang mengatur fungsi BKSAP sebagai alat kelengkapan dewan dalam diplomasi antar parlemen.

C. Susunan Delegasi

Susunan dan komposisi Delegasi DPR RI pada Kunjungan Kerja Panja Blue Economy BKSAP DPR RI ke KEK Kura Kura dan UID Bali Campus pada 3 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Ravindra Airlangga, B.A., M.S	A-300/ F- Partai Golkar	Ketua Panja Blue Economy
Dr. Syahrul Aidi Maazat, L.c., M.A.	A-442/ F-PKS	Anggota Panja Blue Economy
Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A	A-478 / F-PKS	Anggota Panja Blue Economy
Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.	A-496/ F-PAN	Anggota Panja Blue Economy

D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Panja Blue Economy BKSAP DPR RI ke KEK Kura Kura dan UID Bali Campus diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan langsung terhadap implementasi prinsip ekonomi biru pada KEK Kura Kura Bali, termasuk tata kelola kawasan, pengelolaan lingkungan model, investasi, dan keterlibatan masyarakat pesisir;
2. mengidentifikasi peluang penguatan legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung kawasan ekonomi biru dan kawasan pesisir prioritas;
3. melakukan dialog strategis dengan UID Bali, sebagai pusat inovasi SDGs, terkait model blue financing dan pengembangan kapasitas SDGs pada kebijakan kelautan;
4. mengeksplorasi peluang kemitraan internasional, termasuk riset bersama dan advokasi diplomatik terkait ekonomi biru;
5. menyusun rekomendasi Panja untuk memperkuat strategi nasional ekonomi biru yang selaras dengan standar global dan berbasis ilmiah.

E. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Panja Blue Economy BKSAP DPR RI ke KEK Kura Kura dan UID Bali Campus pada tanggal 3 Desember 2025 di Denpasar, Bali, telah dilakukan serangkaian kegiatan baik dari segi teknis maupun substansi. Dari sisi teknis, sekretariat telah melaksanakan koordinasi dengan KEK Kura-Kura dan UID Bali Campus; dan dari sisi substansi Tenaga Ahli telah menyusun materi berupa *Terms of Reference* (TOR), naskah sambutan Ketua Delegasi dan Ketua BKSAP, serta usulan butir wicara untuk Anggota Delegasi.

II. LAPORAN KEGIATAN

A. Agenda Kegiatan

1. Sambutan

- **Tantowi Yahya**, President of United in Diversity Foundation, Chairman of KEK Kura-kura Bali
- **Dr. Syahrul Aidi Maazat**, Ketua BKSAP
- **Ravindra Airlangga, B.A., M.S.**, Ketua Panja Blue Economy
- **Suyoto**, Chancellor, United in Diversity Foundation

2. Sesi Paparan

- **Zefri Alfaruqy**, Head of Communication, Kura Kura Bali
- **Junita Manuputty**, Field Associate of PT. Moores Rowland Bali & Associate of Starling Resources
- **Eko Octavianus Chalim**, Co-Founder, KOLEKTIF & Independent Fisheries Consultant

3. Sesi Diskusi



Gambar 1.0 Fokus Pertemuan dalam Agenda Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali (UID) Bali Campus

B. Jalannya Kunjungan

Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja Panja Blue Economy BKSAP DPR RI ke KEK Kura Kura dan UID Bali Campus dimulai pukul 14.00 WITA. Acara dibuka dengan sesi sambutan, dilanjutkan dengan sesi paparan, dan ditutup dengan sesi diskusi.

Sesi Sambutan

Sesi ini diawali dengan sambutan dari **Tantowi Yahya, President of United in Diversity Foundation, Chairman of KEK Kura-kura Bali**. Ia membuka sambutannya dengan mengajak seluruh peserta untuk menundukkan kepala sejenak sebagai ungkapan belasungkawa atas bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Setelah itu, beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada Delegasi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI di UID Bali Campus yang berdiri di dalam kawasan KEK Kura-Kura Bali.



Gambar 1.1 Sambutan President of United in Diversity Foundation, Bapak Tantowi Yahya, Chairman Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali (UID)

Dalam penjelasannya, Bapak Tantowi Yahya menyoroti bahwa KEK Kura-Kura Bali dikembangkan bukan sebagai kawasan ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata, melainkan sebagai kawasan yang dibangun berlandaskan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), keberlanjutan, *circular economy*, dan model pembangunan regeneratif. Sebagai Chairman, ia menegaskan bahwa karakter kawasan ini sejak awal dirancang untuk menjadi prototipe pembangunan masa depan yang menyeimbangkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Beliau kemudian menyampaikan apresiasi khusus kepada BKSAP DPR RI yang disebutkan memiliki posisi strategis dalam diplomasi antarpemerintah. Ia juga mengingat kembali pengalamannya sebagai Wakil Ketua BKSAP selama menjabat sebagai anggota DPR, termasuk perannya yang telah membawanya mengunjungi lebih dari 160 negara. Menurut Tantowi, alasan kunjungan Panja Ekonomi Biru ke KEK Kura-Kura dan UID tepat karena kedua institusi ini memiliki fondasi dan mandat yang selaras dengan agenda ekonomi biru.

Tantowi Yahya menjelaskan bahwa UID merupakan organisasi nirlaba milik Indonesia yang sudah berdiri selama 24 tahun lalu dengan tujuan membantu pemerintah melahirkan generasi pemimpin pada berbagai tingkatan, dari birokrasi hingga sektor swasta, yang memiliki pemahaman kuat mengenai SDGs, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa tugas penting UID berikutnya adalah mempromosikan dan membumikan SDGs, sebab hingga kini masih banyak pihak yang belum memahami esensi dan penerapan SDGs dalam kehidupan sehari-hari. UID, yang didirikan pada tahun 2001 oleh tiga pilar, pemerintah melalui Universitas Indonesia, sektor swasta melalui Grup Gajah Tunggal, serta lembaga non-profit yang didirikan sendiri bersama Massachusetts Institute of Technology (MIT), dibangun sebagai pusat kolaborasi keberlanjutan tingkat global.

Menutup sambutannya, Bapak Tantowi Yahya menegaskan bahwa KEK Kura-Kura Bali merupakan lokasi yang sangat tepat untuk membahas dan mengembangkan agenda ekonomi biru, karena berbagai inovasi, kolaborasi,

dan eksperimen pembangunan berkelanjutan telah berlangsung nyata di kawasan ini. Ia berharap kunjungan ini dapat memperluas dialog dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ekonomi biru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh **Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat**. Dalam sambutannya, Ketua BKSAP menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari manajemen KEK Kura-Kura Bali dan United in Diversity (UID) Bali Campus yang telah memfasilitasi dialog dan pertukaran pengetahuan. Ketua BKSAP menjelaskan bahwa tema kunjungan, *Penguatan Ekonomi Biru Indonesia melalui Diplomasi Pengetahuan, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kemitraan Global*, dipilih karena relevansinya dengan posisi Indonesia sebagai negara kelautan dan kepulauan yang sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045 yang menjadi pedoman strategis dalam konsolidasi kebijakan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.



Gambar 1.2 Sambutan Ketua BKSAP DPR, Dr. Syahrul Aidi Maazat memberikan apresiasinya kepada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali (UID) Bali

Ketua BKSAP juga menyinggung sejumlah temuan awal terkait implementasi ekonomi biru di tingkat daerah, termasuk contoh nelayan di Kabupaten Badung yang menerima bantuan panel surya namun daya tahannya hanya sekitar enam jam. Situasi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan regulasi, pembiayaan, serta desain program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan operasional nelayan. Beliau menekankan bahwa praktik ekonomi biru sebenarnya telah lama hidup dalam tradisi masyarakat pesisir Bali, sehingga kebijakan nasional harus mengakui dan memperkuat praktik lokal tersebut. Selain itu, Ketua BKSAP menyoroti tantangan tata kelola akibat pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten/ kota di wilayah pesisir dan pemerintah pusat di laut lepas, yang berdampak pada efektivitas pengawasan maupun perencanaan ruang laut.

Dalam penutup sambutannya, Ketua BKSAP menyampaikan harapan agar UID Bali terus melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang menghargai keberlanjutan serta mampu memadukan pengetahuan ilmiah, kearifan lokal, dan perspektif global dalam pengambilan kebijakan. Ia menegaskan kembali komitmen BKSAP untuk memperkuat diplomasi pengetahuan dan kemitraan internasional guna mendorong transformasi ekonomi biru Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Dialog ini diharapkan menghasilkan masukan strategis yang dapat memperkuat sinergi kebijakan nasional serta meningkatkan kontribusi parlemen dalam pembangunan ekonomi biru di masa mendatang.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh **Ketua Panja Blue Economy BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, B.A., M.S.** Dalam pengantarnya, ia menyoroti perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang saat ini baru berada pada kisaran 17–18 persen yang dinilai *on track*. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah-langkah luar biasa untuk mempercepat implementasi, khususnya pada SDG 14 yang berkaitan dengan tata kelola laut. Ia menegaskan bahwa isu laut tidak dapat dipahami secara terpisah atau *siloe*d, melainkan harus dilihat sebagai satu ekosistem yang saling terhubung, mulai

dari pesisir, ruang laut, hingga hubungan antar-sektor. Menurutnya, pendekatan yang terfragmentasi akan menghambat upaya menemukan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan.



Gambar 1.3 Ketua Panja Blue Economy BKSAP, Ravindra Airlangga, B.A., M.S melakukan peninjauan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali (UID)

Ketua Panja menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan karena Panja Ekonomi Biru ingin memperkuat basis pengetahuan dalam penyusunan kebijakan. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga multisektoral, sehingga mampu menjawab kompleksitas tantangan kelautan. Ravindra turut menyoroti fakta bahwa wilayah pesisir Indonesia jauh lebih luas dibandingkan Tiongkok, namun kapasitas infrastruktur maritim Indonesia masih tertinggal jauh. Kesenjangan inilah yang menurutnya harus dipetakan dan dijawab melalui kebijakan ekonomi biru yang tidak hanya menekankan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan pembangunan dan keberlanjutan.

Dalam konteks itu, Ravindra melihat pendekatan *regenerative development* dan model *multi-helix collaboration* yang diterapkan UID sebagai contoh relevan bagi Panja Ekonomi Biru, khususnya dalam upaya mengintegrasikan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat ke dalam satu kerangka kolaborasi.

Ia menegaskan bahwa Panja sangat membutuhkan masukan substantif dari para mitra seperti UID dan KEK Kura-Kura Bali untuk memperkuat rekomendasi dan arah kebijakan ke depan. Menutup sambutannya, Ravindra menyampaikan bahwa memasuki 2030, isu diplomasi Indonesia akan semakin dekat dengan agenda lingkungan hidup, termasuk investasi yang ramah lingkungan. Ia berharap kerja sama seperti ini dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak dilakukan dengan mengorbankan lingkungan, tetapi justru memperkuat keberlanjutan jangka panjang bagi Indonesia.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh **Suyoto, Chancellor United in Diversity (UID) Foundation**. Ia menjelaskan bahwa UID lahir dari tiga keprihatinan besar mengenai masa depan manusia dan planet ini. Pertama, tingkat konsumsi manusia yang telah mencapai 107 persen kapasitas bumi, membuat umat manusia secara ekologis *berutang kepada alam*. Kedua, meningkatnya kesenjangan sosial yang mengancam kohesi dan keadilan. Ketiga, terjadinya *spiritual dividing*, yakni keterputusan manusia dari jati dirinya, sesamanya, dan alam. Menurutnya, ketiga persoalan ini menjadi fondasi refleksi UID dalam mendorong perubahan, termasuk dalam pendekatan terhadap ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Suyoto menekankan prinsip pertama UID, yaitu pentingnya inovasi sosial. Berbeda dari inovasi bisnis yang berorientasi ego dan keuntungan, inovasi sosial mensyaratkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui pendekatan multi-stakeholder. UID, melalui platform Tri Hita Karana Forum, mengembangkan inisiatif seperti Blue Halo S Carbon dan *blended finance* yang berperan mempercepat pencapaian SDGs. Ia menyebut bahwa konsep *sustainable finance* yang kini menjadi agenda global juga dipelopori UID dan diluncurkan pada pertemuan G20. Suyoto menegaskan bahwa kampus UID di KEK Kura-Kura Bali merupakan bagian penting dari diplomasi SDGs Indonesia, tempat tokoh global datang mempelajari filosofi Tri Hita Karana, yaitu harmoni manusia, alam, dan Tuhan serta prinsip *better business, better world*.

Suyoto kemudian menjelaskan prinsip kedua, yaitu perlunya teknologi sebagai *enabler* untuk menciptakan dampak yang lebih hijau, dan prinsip ketiga, yakni tata kelola dan kelembagaan yang kuat agar setiap kebijakan diuji melalui *trade-off* yang transparan berdasarkan data. Transformasi sistem, menurutnya, hanya dapat berjalan bila manusia yang menjalankan kebijakan terpanggil oleh kesadaran moral, bukan sekadar mengikuti dorongan pribadi. UID berkomitmen menjalankan transformasi tersebut melalui inovasi sosial yang terstruktur. Ia memaparkan agenda utama UID, termasuk *learning and capacity building*, inisiatif inovasi sosial, *ecosystem engagement*, hingga pembangunan *ecosystem hub*. UID telah menjalankan program unggulan seperti IDEAS Program dan melahirkan lebih dari dua ribu alumni yang tersebar di berbagai negara dan sektor. Dengan seluruh upaya ini, UID menempatkan diri sebagai pusat pembelajaran dan inovasi yang memperkuat percepatan transformasi berkelanjutan di Indonesia dan dunia.

Sesi Paparan

Sesi paparan dan diskusi dipandu oleh **Israruddin, Director of Partnership THK Forum and Policy Lab, United in Diversity Foundation**, yang memfasilitasi pertukaran pandangan mengenai praktik ekonomi biru, kolaborasi multipemangku kepentingan, serta tantangan pendanaan dan kebijakan di sektor kelautan.

Paparan pertama disampaikan oleh **Zefri Alfaruqy, Head of Communication Kura-Kura Bali**. Ia menjelaskan bahwa KEK Kura-Kura Bali dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkomitmen pada prinsip keberlanjutan, dengan komunikasi yang erat bersama UID untuk memastikan setiap langkah pembangunan sesuai standar *sustainability*. Visi kawasan ini adalah menerapkan prinsip Tri Hita Karana secara bertanggung jawab tanpa menghilangkan keindahan dan budaya Bali. Setiap pembangunan dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat sekitar, termasuk kerja sama dengan desa-desa tetangga dan Turtle Conservation and Education Centre (TCEC)

yang menjadi asal-usul penamaan Kura-Kura. Kura-Kura Bali juga bekerja bersama asosiasi koral dan ikan hias untuk pelestarian terumbu karang, budidaya ikan, dan rumput laut, komoditas yang menjadi bahan utama rujak bulung khas Desa Serangan, serta menjaga tradisi budaya seperti *melintar*, ritual yang mengelilingi desa dan kawasan KEK sebagai upacara pembersihan menurut agama Hindu.

Paparan berikutnya disampaikan oleh **Eko Octavianus Chalim, Co-Founder KOLEKTIF**, konsultan perikanan independen sekaligus alumni Program Bekal Pemimpin UID angkatan ketiga, memaparkan inisiatifnya di bidang perikanan berkelanjutan. KOLEKTIF bergerak melalui tiga jalur utama: layanan konsultasi profesional (*eco-label*, asesmen teknis, dan pendampingan bagi pembeli internasional maupun pabrik lokal), penyusunan rekomendasi kebijakan dan FGD untuk menyelaraskan standar perikanan Indonesia dengan pasar global, serta pelatihan dan pendampingan masyarakat pesisir dan pemerintah daerah dalam manajemen perikanan.

Paparan terakhir disampaikan oleh **Junita Manuputty, Field Associate PT Moores Rowland Bali dan Associate di Starling Resources**, juga alumni Program Bekal Pemimpin UID. Ia menjelaskan bahwa Starling berfokus pada pembiayaan berkelanjutan, termasuk inisiatif perikanan berkelanjutan di Lampung, Jawa Barat, dan berbagai kawasan konservasi yang menghadapi keterbatasan pendanaan. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah mendorong pembentukan unit pengelola BLUD sebagai mekanisme pendanaan yang lebih stabil bagi taman nasional, melalui kajian dan kerja sama dengan Bappenas. Junita menyoroti bahwa pendanaan donor sering kali tidak stabil dan tidak selalu mudah diakses, sehingga model seperti Blue Abadi Fund di Raja Ampat menjadi contoh penting pendanaan yang lebih inklusif dan membantu organisasi lokal yang bergerak di garis depan konservasi.

C. Partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI

Dalam sesi diskusi, **Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., Anggota BKSAP**, membuka dengan menekankan besarnya potensi kelautan Indonesia yang

belum termanfaatkan secara optimal. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km, menjadi produsen rumput laut terbesar kedua di dunia, serta memiliki potensi tujuan wisata bahari yang sangat besar. Namun, aktivitas ekonomi di kawasan pesisir dinilainya masih jauh dari optimal, termasuk pemanfaatan potensi pariwisata yang belum tergarap secara maksimal. Habib mendorong gagasan pembentukan *Dana Abadi Pesisir* sebagai instrumen untuk memperkuat UMKM pesisir dan kelompok ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi selama ini hanya memperoleh porsi kecil dari skema KUR. Ia juga menilai instrumen seperti *blue bond* dan *blue sukuk* belum menjadi arus utama, sementara *green sukuk* kurang diminati karena dianggap tidak cukup atraktif dari sisi imbal hasil. Menurutnya, ekosistem ekonomi biru menghadapi hambatan struktural yang perlu diurai secara sistematis, mulai dari skema *blended finance* untuk budidaya laut dan restorasi ekosistem hingga rekomendasi kebijakan yang mengaitkan hambatan tersebut dengan proyeksi potensi PDB dan peningkatan PNBPN dari sektor kelautan.



Gambar 1.4 Anggota BKSAP, Habib Idrus Salim Aljufri mendorong perkuatan UMKM pesisir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali (UID) Bali

Ketua BKSAP, Dr. Syahrul Aidi Maazat menekankan kembali pentingnya memperjelas dua hal pokok: kebermanfaatan langsung bagi masyarakat dan kendala utama di lapangan. Ia menegaskan bahwa DPR RI membutuhkan gambaran yang tajam mengenai manfaat, hambatan, dan *policy gap* agar rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah memiliki dasar yang kuat dan jelas. Dalam konteks penguatan dimensi pengetahuan, **Anggota BKSAP, Dr. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.** kemudian mengarahkan pertanyaan kepada UID dengan fokus pada pemerataan akses ilmu dan kapasitas. Ia menanyakan apakah UID memiliki program untuk berbagi pengetahuan dan metodologi pembelajaran ke kampus-kampus di daerah, serta bagaimana ilmu dan jaringan yang dimiliki UID dapat ditularkan kepada generasi muda dan perguruan tinggi di luar pusat-pusat utama seperti Bali dan Jakarta, sehingga penguatan pemuda dan SDGs tidak hanya terpusat di satu kawasan.



Gambar 1.5 Anggota BKSAP, Ibu Dewi Coryati mendorong penguatan dimensi pengetahuan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali (UID) Bali

Di sisi lain, **Ravindra Airlangga, B.A., M.S., Wakil Ketua BKSAP, Ketua Panja Blue Economy** menyoroti pentingnya kerangka hukum dan skema pendanaan yang memadai bagi kawasan konservasi dan ekonomi biru. Ia merujuk pada kerangka UU 5/1990 dan revisinya dalam UU 32/2024 yang membuka ruang lebih besar bagi pengelolaan konservasi serta pemanfaatan

terbatas yang membutuhkan skema *blended finance*. Ravindra menegaskan bahwa memasuki era perdagangan karbon dan upaya standardisasi regional di ASEAN, Indonesia memerlukan keberanian politik (*political will*) untuk memastikan kawasan konservasi dan skema *blue carbon* memiliki dukungan regulasi dan pendanaan yang kuat, sehingga tidak tertinggal dari negara lain dan mampu memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara kepulauan besar.

Menanggapi pandangan tersebut, pihak UID dan KEK Kura-Kura Bali memberikan sejumlah penjelasan. **Tantowi Yahya** menjelaskan bahwa KEK, termasuk Kura-Kura Bali, dirancang sebagai instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia memaparkan bahwa terdapat 24 KEK di seluruh Indonesia yang secara teori bertujuan meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas kesempatan ekonomi lokal. KEK Kura-Kura Bali diproyeksikan mampu menyerap hingga 90.000 tenaga kerja, jauh melampaui jumlah penduduk Desa Serangan yang sekitar 3.000 jiwa, sehingga diharapkan memberi manfaat bagi seluruh Bali bahkan luar Bali. Ia menyoroti bahwa KEK memperoleh fasilitas *tax holiday* dan kemudahan impor, namun kendala utama justru terletak pada belum solidnya dukungan dan keseragaman persepsi di antara para pemangku kepentingan, termasuk DPR dan DPD. Menurutnya, selama dukungan politik belum utuh, investor akan ragu. Di sisi pembiayaan, ia menegaskan bahwa *blended finance* yang dipromosikan UID dan diadopsi G20 adalah strategi penting untuk membiayai program-program SDGs yang secara komersial kurang menarik, dengan cara membuka sumber pendanaan non-tradisional seperti filantropi, swasta, dan NGO. Namun inisiatif *global blended finance hub* yang direncanakan di Indonesia, menurutnya, masih berjalan di tempat karena belum ada alokasi dana yang memadai dari pemerintah.

Suyoto melengkapi dengan menjelaskan bahwa praktik *green finance* dan *multisource blended finance* sebenarnya sudah ada di Indonesia, tetapi belum terlembagakan kuat dalam konteks kebijakan pemerintah. Tantangan besar ada

pada ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan proyek-proyek yang diakui dan dipercaya oleh lembaga keuangan maupun filantropi global. UID, melalui berbagai program seperti Bekal Pemimpin, IDEAS, dan jejaring LENTERA Indonesia, berupaya melatih talenta-talenta yang mampu merancang proyek SDGs yang layak didanai. Ia mencontohkan kasus energi transisi di Bali, di mana pelaku bisnis konvensional enggan masuk tanpa ada pihak yang menanggung *harga sosial* dari perubahan tersebut. Di bidang pendidikan, ia menjelaskan konsep CDIO (*Concept, Design, Operate, and Implement*) sebagai kerangka pengembangan kampus yang jika diadopsi dapat meningkatkan peringkat global dan memperkuat relevansi riset dengan kebutuhan industri dan masyarakat, termasuk melalui inisiatif untuk menjembatani kampus-kampus daerah seperti Universitas Bengkulu agar dapat mengakses jejaring dan metode UID.

Dari sisi penyelenggara program di lapangan, **Eko Octavianus Chalim** menekankan bahwa keterbatasan pendanaan dan desain kebijakan seringkali menjadi hambatan utama bagi ekosistem perikanan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa dana donor untuk proyek SDGs bersifat terbatas dan jangka pendek, sementara alokasi APBN lebih banyak fokus pada regulasi dan infrastruktur, bukan pada kemudahan akses bagi nelayan. Ia memberikan contoh nelayan tuna yang harus menghabiskan empat jam per hari hanya untuk mengurus surat BBM bersubsidi, serta banyaknya aplikasi digital KKP yang tidak terintegrasi. Menurutnya, keunikan Indonesia, baik dari sisi keragaman jenis ikan maupun alat tangkap, menuntut kebijakan yang benar-benar disesuaikan dengan karakter nelayan lokal.

Pandangan mengenai pendanaan konservasi kemudian dilengkapi oleh **Regina Manuputy** yang menyoroti kecilnya dukungan APBN untuk kawasan konservasi dibandingkan taman nasional, sehingga banyak beban didelegasikan ke pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas. BLUD memang membuka ruang fleksibilitas pendanaan, namun tetap menghadapi keterbatasan karena sumber donor tidak selalu stabil dan tidak mudah diakses.

Dalam konteks ini, *blue carbon* dan *carbon finance* dipandang sebagai peluang besar.

Diskusi menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi menjadi *hub blue carbon* Asia Pasifik, apalagi sudah memiliki payung hukum dan pengalaman inisiatif seperti Blue Abadi Fund. Namun negara lain, seperti Singapura, juga tengah memposisikan diri sebagai pusat perdagangan karbon kawasan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Kunjungan Kerja Panja Blue Economy BKSAP DPR RI ke KEK Kura-Kura Bali dan UID Bali Campus, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ekonomi biru adalah agenda strategis yang membutuhkan pendekatan ekosistem, bukan sektoral. Tata kelola laut dan pesisir harus dilihat secara terhubung dari hulu ke hilir, pesisir, ruang laut, regulasi, investasi, hingga diplomasi internasional, dengan basis kebijakan yang berbasis data, multisektoral, dan mengakui praktik ekonomi biru tradisional yang sudah lama dijalankan masyarakat pesisir.
2. Potensi ekonomi biru Indonesia masih jauh dari optimal akibat hambatan struktural di tingkat kebijakan, pendanaan, dan implementasi. Diskusi menyoroti bahwa meskipun Indonesia memiliki garis pantai yang sangat luas, potensi wisata bahari, perikanan, dan budidaya laut belum termanfaatkan secara memadai. Skema pembiayaan seperti *blue bond*, *blue sukuk*, dan *green/blue finance* belum menjadi arus utama; UMKM dan ultra mikro pesisir masih menghadapi keterbatasan akses KUR; sementara pendanaan donor bersifat terbatas dan tidak stabil.
3. Terdapat kebutuhan mendesak untuk melembagakan kerangka *blended finance* dan memperkuat arsitektur pendanaan konservasi serta ekonomi biru. Hasil diskusi menekankan bahwa *blended finance* merupakan instrumen kunci untuk membiayai proyek SDGs yang secara komersial kurang menarik, namun skemanya belum terbangun kuat dalam kebijakan pemerintah.
4. Pendanaan kawasan konservasi masih rendah, BLUD menghadapi keterbatasan, dan Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi menjadi *hub blue carbon* di Asia Pasifik meskipun memiliki potensi dan dasar hukum yang kuat.
5. Kesenjangan kapasitas dan tata kelola menjadi salah satu penghambat utama penguatan ekonomi biru. Tantangan meliputi fragmentasi kewenangan pusat-daerah, rumitnya proses birokrasi, belum terintegrasinya sistem digital sektor kelautan, serta keterbatasan SDM yang mampu merancang proyek ekonomi

biru yang memenuhi standar lembaga keuangan global dan filantropi internasional.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja dan dialog dengan para mitra di KEK Kura-Kura Bali dan UID Bali Campus, Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. DPR RI perlu mengonsolidasikan temuan Panja Blue Economy menjadi rekomendasi kebijakan nasional ekonomi biru yang terpadu. Rekomendasi sebaiknya mencakup penguatan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045, penegasan pembagian kewenangan pusat–daerah di wilayah pesisir dan laut, serta pengakuan dan penguatan praktik ekonomi biru tradisional yang telah lama dijalankan masyarakat lokal.
2. Pemerintah didorong untuk segera melembagakan kerangka *sustainable finance* dan *blended finance* bagi ekonomi biru dan konservasi. Hal ini meliputi penyusunan payung regulasi dan kelembagaan, dukungan APBN untuk inisiatif *global blended finance hub* yang telah digagas, serta pengembangan instrumen *blue bond* dan *blue sukuk* yang menarik bagi investor dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.
3. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat arsitektur pendanaan kawasan pesisir dan konservasi melalui kombinasi APBN, BLUD, dan skema dana berkelanjutan. DPR RI dapat mendorong kajian dan pengembangan skema seperti Dana Abadi Pesisir untuk UMKM dan ultra mikro pesisir, sekaligus memastikan bahwa beban pendanaan kawasan konservasi tidak sepenuhnya dialihkan ke daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas.
4. Perlu dilakukan penyederhanaan regulasi dan integrasi sistem tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah bersama DPR dapat meninjau ulang kerumitan prosedur perizinan, akses subsidi, serta tumpang tindih aplikasi dan sistem digital di sektor kelautan agar nelayan dan pelaku usaha pesisir tidak terbebani biaya transaksi yang berlebihan, sambil tetap menjaga standar keberlanjutan dan kepatuhan.

5. Kemitraan strategis dengan UID dan KEK Kura-Kura Bali perlu diperkuat sebagai model percontohan ekonomi biru dan diplomasi pengetahuan. DPR RI dapat mendorong perluasan program pengembangan kapasitas, inovasi sosial, dan jejaring SDGs yang diinisiasi UID ke kampus-kampus di daerah, sehingga transfer pengetahuan, kepemimpinan SDGs, dan model kolaborasi multi-heliks tidak hanya terpusat di Bali, tetapi menjangkau berbagai wilayah Indonesia.
6. Indonesia perlu menegaskan posisi kepemimpinan dalam agenda *blue carbon* dan ekonomi biru di kawasan Asia Pasifik. DPR RI bersama pemerintah dapat mendorong percepatan regulasi turunan dari UU terkait konservasi dan *blue carbon*, menyiapkan standar nasional yang kompatibel dengan standar ASEAN, serta memanfaatkan instrumen diplomasi parlemen untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam perdagangan karbon dan inisiatif ekonomi biru regional.
7. DPR RI perlu menguatkan koordinasi lintas komisi dalam pengawalan agenda ekonomi biru. Pembahasan kerangka hukum, pendanaan, konservasi, dan pembangunan wilayah pesisir memerlukan kerja bersama antara komisi yang membidangi keuangan, lingkungan hidup, kelautan, dan pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan konsisten, saling mendukung, dan berpihak pada keberlanjutan jangka panjang.

IV. PENUTUP

A. Anggaran

Penyelenggaraan dan partisipasi Delegasi DPR RI pada Kunjungan Kerja Panja Blue Economy BKSAP DPR RI ke KEK Kura Kura dan UID Bali Campus pada tanggal 3 Desember 2025 di Denpasar, Bali menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dari anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Dewan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.202.639.000,00 (Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

B. Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi

Delegasi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada manajemen KEK Kura-Kura Bali dan United in Diversity (UID) Bali Campus yang telah menerima dan memfasilitasi dialog dalam rangka Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru. Dukungan, sambutan hangat, serta pertukaran pengetahuan yang konstruktif telah memungkinkan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan sukses, lancar, dan penuh manfaat bagi penguatan agenda ekonomi biru Indonesia.

C. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

1. [Foto Kegiatan](#)
2. *Terms of Reference*
3. Naskah Sambutan Ketua BKSAP DPR RI
4. Naskah Sambutan Ketua Panja Blue Economy
5. Usulan Butir Wicara Anggota Panja Blue Economy

Jakarta, 10 Desember 2025

Ketua Delegasi

Ravindra Airlangga, B.A., M.S.

A-300



LAMPIRAN

“LAPORAN KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA (PANJA) EKONOMI BIRU
KE KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KURA KURA BALI
DAN UNITED IN DIVERSITY (UID) BALI CAMPUS”



TERMS OF REFERENCE (TOR)

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DPR RI KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA (PANJA) EKONOMI BIRU KE KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) KURA KURA BALI DAN UNITED IN DIVERSITY (UID) BALI CAMPUS BALI, 3-5 DESEMBER 2025

“Penguatan Ekonomi Biru Indonesia Melalui Diplomasi Pengetahuan, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kemitraan Global”

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis panjang garis pantai mencapai 99.093 km, dan wilayah yurisdiksi laut yang mencakup 70% dari total wilayah negara. Kawasan maritim Indonesia bukan hanya ruang ekologis, tetapi juga ruang ekonomi, diplomasi, dan pembangunan masa depan. Dalam dua dekade terakhir, diskursus global mengenai *blue economy* mengalami transformasi signifikan, bergeser dari konsep eksploitasi sumber daya laut menuju paradigma *ocean stewardship*,¹ *nature-based investment*,² dan *regenerative development*³ yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologi, dan keadilan sosial.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengambil peran strategis dalam agenda tersebut melalui sejumlah kerangka global. Di antaranya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

¹ Pengelolaan ekosistem laut yang bertanggung jawab dan beretika, menyeimbangkan ekologi dan sosial ekonomi untuk masa depan yang berkelanjutan.

² Skema pembiayaan dan investasi yang menempatkan alam sebagai aset produktif dan basis penciptaan nilai ekonomi, sambil memastikan fungsi ekologisnya tetap sehat dan meningkat.

³ Pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi juga bertujuan menghasilkan dampak positif dengan memulihkan, memperbaiki, dan meningkatkan kesehatan ekosistem, komunitas, dan ekonomi lokal. *Regenerative development* (RD) dipandang berbeda dari *sustainable development* karena RD bertujuan memulihkan dan meningkatkan kualitas alam dan/atau manusia, lebih dari tujuan *sustainability* untuk mengurangi kerusakan.

(*Sustainable Development Goals/SDGs*) 14: Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), G20 Bali Leaders' Declaration yang menekankan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan, UN Ocean Conference, dan lain sebagainya.

Dalam konteks nasional, mandat ini diperkuat oleh berbagai regulasi dan prioritas pembangunan nasional, termasuk agenda Ekonomi Biru Indonesia 2045, pengembangan kerangka ekonomi biru, serta penguatan tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil. DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan memiliki tanggung jawab memastikan bahwa implementasi kebijakan ekonomi biru berjalan selaras dengan mandat internasional dan kebutuhan domestik.

Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI dibentuk sebagai instrumen mengonsolidasikan *evidence-based policy*, mendorong diplomasi maritim Indonesia, memperkuat ekosistem investasi biru, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi biru bersifat inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap tantangan global. Panja ini juga berharap dapat menghasilkan luaran *Indonesia White Paper on Blue Economy* yang akan menjadi rujukan tolak ukur bagi diplomasi dan tata kelola ekonomi biru di Indonesia.

Untuk tujuan tersebut, diperlukan pemahaman langsung terhadap ekosistem inovasi, tata kelola kawasan, dan model investasi yang sedang berkembang di daerah, terutama di wilayah yang menempatkan ekonomi biru sebagai inti strategi pembangunan. Bali merupakan salah satu laboratorium alam dan sosial terbaik untuk mempelajari hal tersebut.

KEK Kura Kura Bali

Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang dirancang secara eksplisit dengan prinsip *regenerative tourism*, *green and blue infrastructure*, dan *impact investment*, Kura Kura Bali merupakan salah satu model kawasan yang paling relevan untuk mempelajari interaksi antara kebijakan, investasi, dan konservasi. Kura Kura telah mengadopsi perspektif Tri Hita Karana (THK). Sebagai landasan pembangunan di Bali, THK telah menjadi rujukan penting dalam berbagai platform global terkait SDGs. Melalui THK Forum, kawasan ini kemudian berkembang menjadi arena kolaborasi untuk *blended finance*, investasi berkelanjutan, dan pengembangan kawasan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

United in Diversity (UID) Bali Campus

UID Bali berada di garis depan pendidikan keberlanjutan di Asia, berkolaborasi dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University, Tsinghua University, serta jaringan global penggerak pembangunan berkelanjutan. Kampus ini menjadi pusat pelatihan

pemimpin, pusat inovasi SDGs, dan pengembangan proyek *blue innovation*, termasuk pemanfaatan AI untuk pemetaan kelautan, model pembiayaan biru, dan *regenerative design*.

Dengan menghubungkan pemangku kepentingan pemerintah, bisnis, masyarakat adat, akademisi, dan jaringan global, UID Bali menawarkan perspektif *multi-helix collaboration* yang sangat relevan bagi Panja Ekonomi Biru. Pendekatan ini sesuai dengan mandat Panja untuk menjembatani diplomasi, kebijakan, dan riset ilmiah dalam membangun tata kelola kelautan dan maritim Indonesia yang lebih tangguh.

Rangkaian kunjungan ini penting dilaksanakan untuk:

1. Mengidentifikasi kesenjangan kebijakan ekonomi biru yang dapat diperkuat melalui peran DPR RI secara umum dan BKSAP secara khusus.
2. Mengkaji kesiapan ekosistem investasi biru untuk memasuki pasar global, termasuk potensi *blue bonds*, *nature-based credits*, dan proyek *regenerative tourism*.
3. Memperluas jejaring policy knowledge dengan institusi global yang memiliki reputasi akademik kelas dunia.
4. Memperkuat posisi Indonesia sebagai *regional hub* untuk diplomasi ekonomi biru dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Menegaskan kembali kepemimpinan diplomasi parlemen Indonesia dalam tata kelola laut yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan.

II. TUJUAN KEGIATAN

Rangkaian kunjungan ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Melakukan peninjauan langsung terhadap implementasi prinsip ekonomi biru pada KEK Kura Kura Bali, termasuk tata kelola kawasan, pengelolaan lingkungan model, investasi, dan keterlibatan masyarakat pesisir.
2. Mengidentifikasi peluang penguatan legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung kawasan ekonomi biru dan kawasan pesisir prioritas.
3. Melakukan dialog strategis dengan UID Bali, sebagai pusat inovasi SDGs, terkait model *blue financing* dan pengembangan kapasitas SDGs pada kebijakan kelautan.
4. Mengeksplorasi peluang kemitraan internasional, termasuk riset bersama dan advokasi diplomatik terkait ekonomi biru.
5. Menyusun rekomendasi Panja untuk memperkuat strategi nasional ekonomi biru yang selaras dengan standar global dan berbasis ilmiah.

III. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan dalam rangkaian kegiatan ini meliputi:

1. Pertemuan dengan Manajemen KEK Kura Kura Bali: Pemaparan model kawasan ekonomi biru, tata kelola lingkungan dan konservasi, model pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang diterapkan oleh KEK Kura Kura Bali.
2. Diskusi strategis dengan UID Bali Campus: Model pendidikan dan pelatihan ekonomi biru, riset kelautan dan inovasi teknologi, kerangka pendanaan ekonomi biru dan pendanaan campuran, dan potensi kolaborasi *policy-learning* secara internasional.

IV. TEMA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tema **“Penguatan Ekonomi Biru Indonesia Melalui Diplomasi Pengetahuan, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kemitraan Global”**.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada:

Tanggal : 3 November 2025

Tempat : KEK Kura-Kura Bali dan United in Diversity (UID) Bali Campus

VI. PENUTUP

Demikian ToR ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru ke KEK Kura Kua Bali dan UID Bali Campus di Bali pada 3-5 Desember 2025.



Sambutan
Ketua Panitia Kerja Blue Economy/
Wakil Ketua BKSAP

Ravindra Airlangga, B.A., M.S.

dalam

**Kunjungan Kerja Panja Blue Economy ke KEK Kura-Kura dan United
in Diversity Bali Campus**

Denpasar
3 Desember 2025

Yang saya hormati:

- **Ketua BKSAP dan Para Anggota BKSAP.**

- **Bapak Tantowi Yahya**, President of United in Diversity Foundation, Chairman of KEKE Kura-kura Bali,
- **Bapak Suyoto**, Chancellor, United in Diversity Foundation,
- Bapak Zefri Alfaruqy, Head of Communication, Kura-Kura Bali,
- **Bapak Israruddin**, Director of Partnership, THK Forum and Policy Lab, United in Diversity Foundation,
- **Ibu Junita Manuputty**, Field Associate of PT. Moores Rowland Bali & Associate of Starling Resources
- **Bapak Eko Octavianus Chalim**, Co-Founder, KOLEKTIF & Independent Fisheries Consultant
- Rekan-rekan/ Bapak/ Ibu dari Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura dan United in Diversity Bali Campuss,
- Hadirin sekalian;

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

Shalom,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran KEK Kura Kura Bali dan United in Diversity Bali Campus atas penerimaan pada hari

ini. Kami sangat menghargai kesempatan untuk dapat berdiskusi dan belajar langsung dari berbagai inisiatif yang Bapak/Ibu kembangkan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami memperkuat tata kelola ekonomi biru Indonesia melalui dialog, pembelajaran, dan kolaborasi.

Sebagai pengantar, BKSAP adalah alat kelengkapan DPR RI yang mengemban mandat diplomasi parlemen Indonesia. Kami mewakili DPR dalam forum internasional, membangun kolaborasi global, dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam isu-isu strategis seperti SDGs, iklim, perdagangan internasional, dan tentu saja, ekonomi biru. Karena itu, isu kelautan tidak hanya perhatian teknis, tetapi juga agenda diplomasi negara.

Untuk memperkuat peran DPR dalam isu kelautan, BKSAP membentuk Panja Blue Economy pada 2025. Panja ini bertujuan menelaah tantangan tata kelola laut, mengkaji pembiayaan inovatif seperti Blue Bond dan Coral Reef Bond, serta memberikan rekomendasi kebijakan.

Bapak/ Ibu, Hadirin sekalian,

Isu ekonomi biru bersifat global. Kita bicara SDG 14, diplomasi laut di UN Ocean Conference, G20 Bali Leaders' Declaration, AIS Forum, hingga jejaring IPU dan AIPA.

Karena itu Panja ditempatkan di BKSAP, agar pendekatan kami bukan hanya sektoral, tetapi juga diplomatik dan berbasis kerja sama internasional.

Panja menjadi jembatan antara kebijakan nasional, standar global, dan praktik terbaik dari berbagai negara.

Kunjungan ke Bali ini kami rancang untuk dua hal:

- Pertama, belajar langsung bagaimana model tata kelola kawasan dilakukan di lapangan, baik dalam aspek konservasi, investasi, maupun pemberdayaan masyarakat.
- Kedua, mengidentifikasi pembelajaran dan peluang kemitraan yang bisa mendukung rekomendasi Panja.

KEK Kura Kura adalah contoh unik bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan sejalan dengan konservasi melalui konsep regenerative development.

Kami ingin mempelajari bagaimana konsep ini diterjemahkan menjadi tata kelola kawasan, model investasi, dan mekanisme pemberdayaan masyarakat.

UID Bali Campus adalah pusat pembelajaran dan inovasi SDGs yang terhubung dengan universitas terkemuka dunia, yang mengembangkan model multi-helix collaboration yang menghubungkan pemerintah, bisnis, akademisi, dan komunitas.

Pendekatan ini sangat relevan bagi Panja, karena ekonomi biru menuntut integrasi ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan ekosistem pendanaan inovatif.

Hasil yang kami harapkan dari kunjungan ini adalah masukan substantif untuk Panja, rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, serta peluang kolaborasi jangka panjang.

Panja ingin memastikan bahwa diplomasi parlemen kita relevan, efektif, dan memberikan dampak konkret bagi tata kelola laut Indonesia.

Kami berharap dialog hari ini menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, sejahtera, dan berkelanjutan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Sambutan

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI

Dr. Syahrul Aidi Maazat

dalam

Kunjungan Kerja Panja *Blue Economy* ke KEK Kura-Kura dan *United in Diversity Bali Campus*

Denpasar

3 Desember 2025

Yang saya hormati:

- Wakil Ketua dan Para Anggota BKSAP;

- **Bapak Tantowi Yahya**, *President of United in Diversity Foundation, Chairman of KEKE Kura-kura Bali;*
- **Bapak Suyoto**, *Chancellor, United in Diversity Foundation;*
- Bapak Zefri Alfaruqy, *Head of Communication, Kura-Kura Bali;*
- **Bapak Israruddin**, *Director of Partnership, THK Forum and Policy Lab, United in Diversity Foundation;*
- **Ibu Junita Manuputty**, *Field Associate of PT. Moores Rowland Bali & Associate of Starling Resources;*
- **Bapak Eko Octavianus Chalim**, *Co-Founder, KOLEKTIF & Independent Fisheries Consultant;*
- Rekan-rekan/ Bapak/ Ibu dari Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura dan *United in Diversity Bali Campuss;*
- Hadirin sekalian.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua,

Shalom,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama, atas nama Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Republik Indonesia, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan

terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kunjungan kami dalam kerangka berdialog dengan tema “Penguatan Ekonomi Biru Indonesia melalui Diplomasi Pengetahuan, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kemitraan Global”.

Saya menilai bahwa tema tersebut sangat tepat dan mendesak, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan besar dengan kekayaan laut yang luar biasa.

Izinkanlah saya membuka sambutan ini dengan mengingatkan kembali beberapa hal strategis dalam konteks dialog kita hari ini.

Pertama, laut dan sektor kelautan telah menjadi pilar penting perekonomian nasional. Subsektor perikanan merupakan komponen dominan dalam ekonomi biru Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan pada nilai tambah dan lapangan kerja nasional. Dokumen Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia (Edisi ke-2) dan publikasi statistik nasional menegaskan peran besar sektor kelautan dalam menyokong pendapatan dan ketahanan pangan.

Kedua, saya mendukung penuh Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045 sebagai pedoman konsolidasi kebijakan dan program untuk mengoptimalkan pemanfaatan laut yang berkelanjutan, termasuk lima klaster prioritas dan target peningkatan nilai ekonomi kelautan menuju 2045. Perlu diingat bahwa dokumen edisi kedua tersebut disusun bersama mitra internasional dan merupakan pijakan strategis untuk aksi nasional dan kolaborasi global.

Ketiga, saya juga mendukung penuh Bappenas yang baru-baru ini meluncurkan dokumen strategis seperti *Blue Food Assessment* dan *Blue Economy Index* sebagai alat kebijakan untuk mengukur, merencanakan, dan

mempercepat pembangunan ekonomi biru yang berkeadilan dengan menekankan aspek nutrisi, keberlanjutan rantai nilai perikanan, dan pemberdayaan nelayan skala kecil. Langkah ini penting untuk menyusun intervensi yang berbasis bukti.

Keempat, penting untuk menyokong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah memperkuat perencanaan strategis (RENSTRA 2025–2029) yang menitikberatkan pada tata ruang laut nasional, peningkatan kualitas produk perikanan, dan dorongan investasi ekonomi biru yang inklusif yang sejalan dengan identifikasi lokasi prioritas *blue carbon* untuk mitigasi dan konservasi pesisir, yang didukung oleh pelibatan sektor swasta dan *fellowship* strategis untuk mendorong investasi.

Kelima, kita terus perlu memobilisasi dukungan finansial dan kemitraan global termasuk inisiatif World Bank dan lembaga pembangunan lainnya yang telah menghadirkan instrumen pendanaan inovatif seperti proposal *Coral Bond* dan mekanisme lain, untuk konservasi, restorasi habitat, dan penguatan rantai nilai perikanan. Hal ini membuka peluang pembiayaan hasil-usaha berkelanjutan di Indonesia.

Keenam, kita saat ini tengah menghadapi tantangan serius antara lain: praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan, kerusakan habitat pesisir, penangkapan ikan ilegal, keterbatasan infrastruktur logistik, dan kebutuhan besar untuk peningkatan kapasitas SDM nelayan dan pelaku usaha. Tanpa penanganan terpadu, potensi ekonomi biru akan sulit diwujudkan secara berkelanjutan.

Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan,

Dari sudut pandang parlemen, menurut saya, ada beberapa prioritas rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ekonomi biru melalui diplomasi pengetahuan dan kemitraan global:

Pertama, kita memerlukan penguatan sinergi kebijakan antar-lembaga untuk memastikan Peta Jalan Ekonomi Biru diimplementasikan secara terintegrasi (tata ruang laut, perikanan, konservasi, dan infrastruktur).

Kedua, kita juga harus meningkatkan investasi berorientasi keberlanjutan melalui insentif yang mendorong *downstreaming* industri perikanan, *green shipping*, dan teknologi maritim dengan jaminan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

Ketiga, kita perlu memperkuat kolaborasi penelitian internasional, *data sharing*, dan program *capacity building* agar kebijakan didasarkan pada bukti ilmiah terkini.

Keempat, perlu diperhatikan urgensi pengarusutamaan kesejahteraan nelayan kecil dan keadilan sosial dalam setiap inisiatif ekonomi biru sehingga pertumbuhan bersifat inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan.

Kelima, kami secara prinsip akan memperkuat instrumen pendanaan hijau laut (*green/blue finance*) yang dapat menarik modal internasional sekaligus melindungi ekosistem pesisir dan laut.

Hadirin sekalian,

Sebagai Ketua BKSAP, saya menegaskan kembali komitmen parlemen Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam mendukung kebijakan *Blue Economy* di Indonesia melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi antarpemerintah.

Kami di BKSAP akan terus aktif dalam berbagai dialog parlementer internasional, mendorong harmonisasi regulasi, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada ketahanan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat berdiskusi kepada seluruh peserta dialog. Semoga forum ini berlangsung produktif, terbuka, dan konstruktif, serta mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis, rekomendasi kebijakan yang aplikatif, dan kemitraan konkret yang memberikan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi biru Indonesia di masa depan.

Kita harus memiliki visi untuk menjadikan posisi Indonesia yang tidak hanya sebagai negara kelautan terbesar kedua di dunia, tetapi juga sebagai pemimpin transformasi ekonomi biru yang adil dan berkelanjutan.

Sungguh saya sangat mengharapkan hasil diskusi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi lebih jauh dapat menjadi pijakan bersama dalam memperkuat diplomasi pengetahuan, pembangunan berkelanjutan, dan kerja sama global yang saling menguntungkan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

INFORMASI TERKINI DAN SARAN PERTANYAAN

I. Informasi:

- Indonesia sudah meluncurkan sejumlah **dokumen strategis nasional terkait Ekonomi Biru** antara lain:
 - **Blue Food Assessment (BFA)** → Peta komprehensif tentang status pangan akuatik Indonesia.
 - **Indonesia Blue Economy Index (IBEI)** → Indeks nasional untuk mengukur kinerja dan kemajuan implementasi Ekonomi Biru secara berkelanjutan dan inklusif.
- IBEI 2025 menegaskan bahwa:
 - **Sulawesi, Jawa, dan Maluku** menunjukkan performa kuat dalam sektor kelautan berkelanjutan.
 - **Kalimantan, Papua, dan sebagian Sumatra** masih menghadapi tantangan kesejahteraan pesisir dan pengelolaan sumber daya.
- Indonesia juga sudah memiliki Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045 Resmi Menjadi Acuan Pemerintah Roadmap ini menetapkan lima pilar utama:
 1. Perikanan berkelanjutan
 2. Konservasi laut dan keanekaragaman hayati
 3. Ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil
 4. Blue energy dan teknologi kelautan
 5. Ekowisata dan bioekonomi laut
- Roadmap ini juga menargetkan:
 1. Peningkatan kontribusi ekonomi biru ke PDB secara signifikan menjelang 2045.
 2. Transformasi besar-besaran rantai nilai perikanan dan pesisir.

- Saat ini diperkirakan potensi Ekonomi Biru Indonesia mencapai USD 7,4–9,8 Triliun pada 2045. Potensi tersebut naik drastis dibanding estimasi sebelumnya, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi biru terbesar di dunia.
- Sejumlah analis menilai bahwa peningkatan potensi tersebut didorong oleh banyak hal antara lain:
 1. 6,4 juta km² wilayah laut
 2. Garis pantai terpanjang kedua di dunia
 3. Ekosistem mangrove terbesar di dunia
 4. Salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia (*Coral Triangle*).
- Perlu dicatat juga terkait Program Inklusif: seaBLUE Initiative (2025) yaitu program strategis antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), United Nations Development Programme (UNDP), dan Pemerintah Jepang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil dan mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini berfokus pada peningkatan peluang mata pencaharian, penguatan rantai pasok yang ramah lingkungan, dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pendekatan terintegrasi di Morotai dan Kepulauan Tanimbar.
- Perlu dicatat juga program *Blue Coast Project* (BCP) yaitu proyek yang dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, yang sejalan dengan kebijakan ekonomi biru. Proyek ini dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia bekerja sama dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), yang didanai melalui pinjaman dan hibah.

- Tujuan dan fokus utama BCP:
 1. Pengentasan Kemiskinan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberantas kemiskinan di kalangan rumah tangga pesisir dan pulau-pulau kecil.
 2. Pemanfaatan Berkelanjutan: Mendorong pemanfaatan sumber daya laut, seperti perikanan tangkap dan budi daya, dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem.
 3. Restorasi Ekosistem: Melakukan rehabilitasi dan revitalisasi ekosistem pesisir penting, termasuk terumbu karang, lamun, dan mangrove.
 4. Tata Ruang Laut: Memperkuat tata ruang laut dan ekosistem pesisir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru.
 5. Ketahanan Pangan: Meningkatkan ketahanan pangan melalui keberlanjutan rantai pasokan dan peningkatan kualitas produk perikanan.

- Proyek BCP menargetkan tujuh lokasi prioritas di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua.

- Sejak 2024-2025 BPK ikut memperkuat audit Ekonomi Biru
 1. BPK mengembangkan kapasitas audit program ekonomi biru untuk memastikan tata kelola dan akuntabilitas.
 2. Indonesia menjadi salah satu negara yang memimpin kolaborasi audit internasional di sektor kelautan.

- Diluncurkan pula peningkatan ketahanan pangan melalui *Blue Food*. Menurut kebijakan Bappenas dan data 2025:
 1. Indonesia meningkatkan produksi ikan, rumput laut, udang, dan hasil laut lainnya sebagai pangan berkelanjutan berkualitas tinggi.
 2. Blue food diproyeksikan menjadi pilar penting dalam Visi Indonesia Emas 2045.

- Sejumlah pakar menilai bahwa perkembangan Ekonomi Biru Indonesia menghadapi sejumlah tantangan berat antara lain:
 1. Disparitas wilayah pesisir dalam hal infrastruktur dan kesejahteraan.
 2. Ancaman perubahan iklim: kenaikan muka laut, bleaching terumbu karang.
 3. Overfishing di beberapa WPP.
 4. Perlunya peningkatan kapasitas nelayan terhadap teknologi biru.
 5. Perluasan investasi ramah lingkungan yang terukur.

II. Saran Intervensi/Pertanyaan:

1. Indonesia sudah memiliki Blue Economy Roadmap 2023–2045 yang sangat komprehensif. Namun, tantangan utamanya bukan lagi pada perencanaan, melainkan pada konsistensi implementasi lintas kementerian, lintas daerah, dan lintas rezim pemerintahan. Dalam kaitan kita perlu memastikan roadmap ini tidak berhenti sebagai dokumen teknokratik semata. Mohon tanggapannya.
2. Data IBEI 2025 menunjukkan kemajuan wilayah tertentu seperti Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Namun juga terdapat ketertinggalan signifikan masih terjadi di Papua, Kalimantan, dan sebagian Sumatra. Ini mengindikasikan bahwa ekonomi biru kita masih menghadapi ketimpangan struktural antarwilayah. Mohon tanggapannya.
3. Meski program seaBLUE dan Blue Coast Project telah diluncurkan, kita masih melihat bahwa nelayan kecil belum sepenuhnya menjadi aktor utama dalam rantai nilai ekonomi biru, melainkan masih berada di posisi paling lemah dalam pembiayaan, teknologi, dan akses pasar. Mohon tanggapannya.
4. Target peningkatan nilai ekonomi biru hingga triliunan dolar AS ke depan sangat ambisius. Namun, tanpa pengawasan ketat, pertumbuhan ekonomi berisiko menekan daya dukung ekosistem laut, terutama di wilayah padat eksploitasi. Mohon tanggapannya.
5. Inovasi pendanaan seperti blue bonds dan blended finance telah mulai dibahas, tetapi skala dan akses pendanaan biru untuk daerah dan UMKM pesisir masih sangat terbatas. Mohon tanggapannya.

6. Penguatan peran BPK dalam audit ekonomi biru adalah langkah maju. Namun, pengawasan perlu diperluas ke aspek tata niaga, perizinan, dan dampak sosial-ekologis di tingkat tapak. Mohon tanggapannya.
7. Bagaimana mekanisme koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan Roadmap Ekonomi Biru 2023–2045 ke dalam program yang benar-benar sinkron di lapangan?
8. Apakah Indonesia Blue Economy Index (IBEI) dapat dijadikan indikator resmi dalam penentuan alokasi anggaran nasional dan daerah?
9. Bagaimana skema konkret yang harus kita rumuskan agar nelayan kecil dan masyarakat pesisir tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama ekonomi biru?
10. Bagaimana kita terutama pemerintah memastikan bahwa masuknya investasi besar di sektor ekonomi biru benar-benar menghadirkan transfer teknologi dan nilai tambah di dalam negeri, bukan sekadar eksploitasi sumber daya?
11. Dengan meningkatnya tekanan terhadap terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, bagaimana target pertumbuhan ekonomi biru diimbangi dengan batas-batas ekologis (*ecological limits*)?
12. Bagaimana ekonomi biru diintegrasikan secara nyata dengan target penurunan emisi dan ketahanan iklim nasional (NDC dan Net Zero Emission)?
13. Sejauh mana Indonesia telah memanfaatkan pendanaan internasional (*climate finance, blue bonds, MDB*) secara optimal untuk ekonomi biru di daerah tertinggal?
14. Apakah kita saat ini sudah memiliki strategi diplomasi ekonomi biru terpadu untuk menarik kemitraan global yang lebih adil dan berbasis kepentingan nasional?